



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KAMIS, 25 OKTOBER 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

DD Rp 430 Juta Buat Usaha Tambang Batu

**Usaha Merugi DD
Tidak Dikembalikan**

ARGA MAKMUR - Inspektorat Bengkulu Utara (BU) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2017 di Desa Karya Pelita, Kecamatan Putri Hijau. LHP diserahkan ke Kejaksaan Negeri BU. Hasil audit Inspektorat menemukan kerugian negara sebesar Rp 430 juta yang digelapkan oleh kepala desa saat itu.

Inspektur Inspektorat BU, Dullah, SE menuturkan hasil audit sudah diserahkan ke Kejari BU karena audit berdasarkan permintaan jaksa. Dana tersebut juga tidak dilakukan pengembalian oleh kepala desa. "Uang DD Rp

430 juta itu sudah dicairkan dan tidak ada pekerjaan yang dikerjakan. Selain itu tidak ada pertanggungjawaban sama sekali," katanya.

Kades Karya Pelita bernisial An yang kini sudah dinonaktifkan, mengaku waktu itu ia bekerjasama dengan pemilik tambang batu sungai di wilayahnya. Uang DD tersebut digunakan untuk keperluan usaha tambang. "Pengakuannya aktivitas tambang tersebut merugi sehingga dana tersebut tidak bisa dikembalikan. Namun jelas itu untuk kepentingan pribadi karena menggunakan uang DD untuk aktivitas lain," jelas Dullah.

Inspaktor juga sudah memberikan kesempatan pada An untuk mengembalikan uang tersebut. Namun An mengaku

siap mempertanggungjawabkan secara hukum lantaran tidak lagi memiliki uang untuk mengganti uang DD yang digunakannya.

"Jadi bukan fiktif, kalau fiktif ada pekerjaan yang tidak dikerjakan, tetapi ada laporannya. Namun ini sama sekali tidak ada laporan dan dana ditarik dari bank," beber Dullah.

Perangkat desa yang melaporkan masalah ini Kejari BU karena perangkat desa ikut menandatangani pencairan, dan An meminta uang itu diserahkan padanya. Perangkat desa melaporkan hal ini karena sama sekali tidak ada kegiatan yang dilakukan dengan dana tersebut. "Jadi sekarang tinggal kewenangan kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," pungkas Dullah. (qia)